

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA BOS DI SD NEGERI 13 SILORO
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Nurhayana¹, Suardi², Idawati³

¹⁻³Pendidikan Dasar, Universitas Muhammadiyah Makassar

¹ana.thesister@gmail.com, ²suardi@unismuh.ac.id, ³idafadollah@unismuh.ac.id

ABSTRACT

An in-depth study of how the BOS Fund is utilized at the elementary school level is highly relevant to ensure that every fund invested by the state truly impacts the improvement of the quality of national education. The management and supervision of the BOS Fund itself is the responsibility of the Principal, School Treasurer, and School Committee. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the utilization of the BOSP Fund at SD Negeri 13 Siloro, Pangkajene and Kepulauan Regency. Data collection methods used were interviews, document studies, observations, and surveys. The results of this study indicate that the utilization of BOSP funds at the UPT SD Negeri 13 Siloro, Pangkajene and Kepulauan Regency has been implemented very effectively and accountably. This success is driven by a healthy funding structure through the integration of Regular BOS funds, BOS Performance, and participatory community support. Although the largest proportion of the budget is allocated to facility and infrastructure standards (44.6%), the school is able to integrate content standards and graduate competencies inclusively into the learning program. The accountability aspect is strongly supported by the ARKAS and Datakudijarimu digital reporting systems accompanied by tiered supervision. The fundamental impact of this effective management is reflected in the significant improvement in learning quality, marked by a 41.82% increase in literacy and 60.46% increase in numeracy in the 2025 Education Report.

Keywords: School Operational Assistance (BOS) Fund, Effectiveness, Utilization

ABSTRAK

Kajian mendalam mengenai bagaimana pemanfaatan Dana BOS di tingkat sekolah dasar menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap dana yang diinvestasikan negara benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Pengelolaan dan pengawasan pengelolaan Dana BOS sendiri merupakan tanggung jawab dari Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Komite Sekolah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan Dana BOSP di SD Negeri 13 Siloro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumen, observasi dan survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana BOSP di UPT SD Negeri 13 Siloro Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan telah diimplementasikan secara sangat efektif dan akuntabel. Keberhasilan ini didorong oleh struktur pendanaan yang sehat melalui integrasi dana BOS Reguler, BOS Kinerja, serta dukungan partisipatif masyarakat. Meskipun proporsi anggaran terbesar dialokasikan pada standar sarana dan prasarana (44,6%), sekolah mampu mengintegrasikan standar isi dan kompetensi lulusan secara inklusif dalam program pembelajaran. Aspek akuntabilitas didukung kuat oleh sistem pelaporan digital ARKAS dan Datakudijarimu yang disertai pengawasan berjenjang. Dampak fundamental dari efektivitas pengelolaan ini tercermin pada peningkatan signifikan mutu pembelajaran, yang ditandai dengan lonjakan capaian literasi sebesar 41,82% dan numerasi sebesar 60,46% pada Rapor Pendidikan 2025.

Kata Kunci: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Efektivitas, Pemanfaatan

Catatan : Nomor HP tidak akan dicantumkan, namun sebagai fast respon apabila perbaikan dan keputusan penerimaan jurnal sudah ada.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa serta instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia, upaya untuk menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan diwujudkan secara konkret melalui kebijakan pendanaan yang berpihak pada rakyat, salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS hadir sebagai program unggulan pemerintah yang dirancang secara khusus untuk membebaskan atau setidaknya meringankan beban biaya operasional bagi siswa,

terutama pada jenjang Sekolah Dasar (SD) yang merupakan fase krusial dalam wajib belajar dua belas tahun.

Secara yuridis, eksistensi program ini berakar pada amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Peran negara dalam hal ini dimanifestasikan melalui intervensi finansial guna

memangkas hambatan ekonomi yang seringkali menjadi tembok penghalang bagi akses pendidikan yang berkualitas. Sejak awal peluncurannya, Dana BOS telah bertransformasi menjadi sumber pendanaan vital yang menopang seluruh sendi kegiatan belajar-mengajar, mulai dari pengadaan sarana sederhana hingga pengembangan kreativitas siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Pentingnya posisi Dana BOS dalam ekosistem pendidikan dasar dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022. Regulasi ini menyatakan bahwa Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja operasional bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Meski fokus utamanya adalah operasional, dana ini juga membuka ruang bagi pembiayaan kegiatan lain selama selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketersediaan dana yang besar ini membawa konsekuensi logis berupa tuntutan

manajerial yang tinggi bagi pihak sekolah.

Fattah (2009) mengemukakan bahwa, anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan sisi anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Maka dari itu, dengan diterimanya dana tersebut, sekolah sebagai satuan pendidikan kini memikul tanggung jawab penuh sebagai pengelola teknis dalam mekanisme Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Sekolah dituntut untuk memiliki kapabilitas profesional dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, hingga mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya pendidikan tersebut. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan yang kompleks, di mana sekolah wajib menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). RKAS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan potret kebutuhan riil yang disusun melalui evaluasi diri sekolah (EDS) agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan

substansial siswa dan tenaga pendidik.

Setelah dana disalurkan, tantangan berikutnya terletak pada disiplin penatausahaan keuangan. Sekolah harus memastikan setiap pemanfaatan dana, baik untuk penyediaan sarana belajar maupun pembayaran honorarium guru, dilakukan sesuai dengan porsi dan petunjuk teknis yang ketat. Transparansi menjadi kata kunci utama dalam tahap ini. Penggunaan sistem aplikasi resmi seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) menjadi instrumen digital untuk menjamin akuntabilitas. Lebih dari itu, transparansi moral juga harus ditunjukkan sekolah melalui publikasi ringkasan penggunaan dana di papan informasi agar dapat diawasi langsung oleh orang tua siswa dan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas publik yang digariskan dalam Pasal 48 UU No. 20 Tahun 2003.

Secara substantif, pengelolaan keuangan dalam pendidikan dasar memegang peranan fundamental sebagai tulang punggung keberlangsungan proses akademik

yang berkualitas. Menurut Arifudin, dkk (2021:4), Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang penting dan tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar peserta didik pada sekolah atau lembaga pendidikan. Keberadaan manajemen finansial yang strategis bukan sekadar persoalan pembukuan, melainkan instrumen vital untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya mampu menjawab kebutuhan esensial pembelajaran. Dana BOS yang dikelola secara optimal memungkinkan sekolah untuk memitigasi risiko defisit anggaran dan meng-upgrade fasilitas, seperti perbaikan ruang kelas, penyediaan buku teks mutakhir, hingga pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi yang membuat proses pedagogis menjadi lebih interaktif.

Lebih jauh lagi, efektivitas pengelolaan keuangan berkorelasi langsung terhadap peningkatan mutu lulusan. Melalui arus kas yang sehat, sekolah memiliki kemampuan finansial untuk mendanai program pengembangan kompetensi guru dan inovasi

kurikulum secara berkelanjutan. Integrasi antara perencanaan anggaran yang matang dengan skala prioritas pendidikan menciptakan stabilitas operasional yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini membuktikan bahwa dana BOS bukan hanya alat untuk bertahan hidup secara operasional, tetapi merupakan bahan bakar bagi inovasi pendidikan.

Namun, pada realitasnya, mencapai tata kelola yang ideal bukanlah perkara mudah. Sekolah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus mampu bertindak mandiri sekaligus taat asas terhadap prinsip ekonomis, efisiensi, dan kejujuran. Profesionalisme dalam mengatur arus kas pendidikan dasar pada akhirnya menjadi manifestasi tanggung jawab moral lembaga terhadap publik. Tanpa pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, tujuan luhur untuk menjamin hak setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak dan bermartabat akan sulit tercapai. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai bagaimana pengelolaan Dana BOS di tingkat

sekolah dasar menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa setiap sen investasi negara benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional..

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk menggali esensi pengelolaan dana BOSP di UPT SD Negeri 13 Siloro. Data dikumpulkan melalui empat teknik utama: (1) Wawancara mendalam secara semi-terstruktur dengan informan kunci untuk menangkap persepsi dan tantangan moral dalam pengambilan keputusan; (2) Observasi partisipatif pasif terhadap manifestasi fisik alokasi anggaran dan praktik keterbukaan informasi; (3) Studi dokumentasi terhadap RKAS, BKU, dan laporan ARKAS sebagai bukti administratif objektif; serta (4) Survei kepada guru dan wali murid untuk menjaring persepsi kolektif mengenai transparansi dan pemanfaatan dana.

Penentuan sumber data dilakukan secara purposive (sengaja). Informan kunci meliputi

Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab kebijakan, Bendahara sebagai pelaksana teknis, dan Komite Sekolah sebagai representasi pengawasan masyarakat. Sumber data pendukung mencakup dokumen administratif keuangan sekolah, serta guru dan wali murid sebagai objek survei persepsi..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Jenis dan Sumber Dana Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak manajemen sekolah, struktur pendanaan di UPT SD Negeri 13 Siloro pada tahun anggaran 2025 menunjukkan adanya keragaman sumber dana yang bersifat formal maupun partisipatif. Secara umum, sumber dana sekolah dapat dikategorikan menjadi dua bagian utama, yaitu dana BOSP terdiri atas BOSP regular dan BOS Kinerja, dan dana partisipasi masyarakat. Dana BOSP ini dikelola oleh sekolah, dan dana partisipasi masyarakat yang dikelola oleh paguyuban orangtua siswa.

Secara keseluruhan, UPT SD Negeri 13 Siloro menerapkan pola manajemen keuangan yang

memadukan stabilitas anggaran negara dengan gotong royong masyarakat. Sinergi antara BOSP Regular, BOSP Kinerja, dan sumbangan masyarakat ini menjadi pilar utama dalam mendukung segala aktivitas akademik dan non-akademik di sekolah agar tetap berjalan dengan optimal.

2. 4 Penyusunan dan Struktur RKAS

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen, ditemukan bahwa penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SDN 13 Siloro merupakan proses yang terencana dan berbasis data. Kepala Sekolah dan Bendahara menekankan bahwa acuan utama dalam penyusunan anggaran adalah Laporan Mutu (Rapor Pendidikan) tahun 2024 serta hasil telaah Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tidak disusun secara acak, melainkan untuk merespons kebutuhan peningkatan mutu yang objektif.

Proses penganggaran dilakukan secara kolektif sebelum tahun anggaran baru dimulai. Hal ini diperkuat oleh bukti dokumen berupa

Buku Agenda Rapat ARKAS dan Daftar Hadir Rapat, yang mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak (stakeholders). Peserta rapat mencakup internal sekolah (Kepala Sekolah, guru, dan staf) serta pihak eksternal yang terdiri dari Ketua Komite, Pengawas Wilayah, orang tua siswa, hingga perwakilan siswa. Bendahara sekolah memastikan bahwa seluruh rancangan yang didiskusikan tetap berada dalam koridor regulasi pemerintah dan Juknis Dana BOSP terbaru.

Analisis terhadap proses penyusunan RKAS ini mengungkapkan beberapa poin krusial terkait partisipasi dan validitas perencanaan:

a. Validitas Perencanaan Berbasis Bukti (Evidence-Based Planning)

Penggunaan Rapor Pendidikan dan hasil tim SPMI sebagai dasar telaah menunjukkan bahwa sekolah memiliki mekanisme perencanaan yang valid. Sinkronisasi antara kebutuhan lapangan dengan regulasi (Juknis) yang dilakukan oleh Bendahara memastikan bahwa RKAS memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus relevan secara fungsional untuk perbaikan mutu sekolah.

b. Tingkat Partisipasi yang Inklusif
Keterlibatan pengawas, komite, hingga perwakilan siswa dalam rapat penganggaran menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kehadiran pihak-pihak tersebut, yang dibuktikan dengan daftar hadir rapat, berfungsi sebagai bentuk pengawasan sekaligus penyelarasan kepentingan antara pihak sekolah dengan kebutuhan masyarakat (orang tua siswa).

c. Transparansi dan Akuntabilitas Administratif

Adanya bukti dokumen berupa buku agenda dan daftar hadir memvalidasi bahwa proses yang diceritakan oleh ketiga informan bukan sekadar prosedur formalitas di atas kertas, melainkan praktik nyata yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini mencerminkan tata kelola sekolah yang profesional dalam mengelola dana publik.

3. Analisis Proporsi dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan Bendahara, proporsi anggaran Dana BOSP di SDN 13 Siloro tahun 2025 dialokasikan berdasarkan standar

pendidikan dengan rincian yang sangat spesifik. Anggaran terbesar dialokasikan untuk Standar Sarana dan Prasarana sebesar 44,6%, diikuti oleh Standar Pembiayaan (20,2%), Standar Tenaga Pendidik (12,5%), Standar Pengelolaan (10,3%), Standar Penilaian (8,7%), dan Standar Proses (3,8%).

Menariknya, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi tidak muncul sebagai pos anggaran tunggal. Informan menjelaskan bahwa kedua standar tersebut merupakan tujuan akhir dan ruang lingkup materi, sehingga pembiayaannya terintegrasi ke dalam berbagai kegiatan di pos standar lainnya. Ketua Komite menambahkan bahwa proporsi ini telah disesuaikan dengan regulasi terbaru, termasuk pembatasan gaji maksimal 20% dan kewajiban belanja modal minimal 30% sesuai juknis Dinas Pendidikan.

Temuan ini divalidasi melalui studi dokumen terhadap RKAS dan Laporan Realisasi Dana BOS, serta didukung oleh bukti observasi lapangan berupa adanya pengadaan meja guru, buku paket siswa, pembuatan taman sekolah, dan pelaksanaan pelatihan guru yang sedang berjalan.

Analisis terhadap data tersebut menunjukkan beberapa poin penting mengenai efektivitas dan akurasi penganggaran sekolah:

a. Kepatuhan Regulatif dan Responsivitas Aturan

Sekolah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap perubahan kebijakan fiskal pendidikan. Penurunan porsi penggajian dari 50% menjadi 20% menunjukkan bahwa manajemen sekolah mampu melakukan realokasi anggaran secara cepat dan tepat sesuai dengan Juknis Dana BOSP 2025. Hal ini menjamin bahwa perencanaan sekolah memiliki validitas legalitas yang kuat.

b. Prioritas Peningkatan Mutu Fisik dan Lingkungan

Besarnya alokasi pada Standar Sarana dan Prasarana (44,6%) serta bukti fisik berupa pengadaan meja, buku, dan taman menunjukkan bahwa fokus utama sekolah tahun ini adalah pada pemenuhan fasilitas belajar. Strategi ini efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang secara tidak langsung akan mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

c. Integrasi Program yang Komprehensif

Analisis terhadap ditiadakannya pos anggaran khusus untuk Standar Isi dan SKL menunjukkan pemahaman manajerial yang matang. Pihak sekolah memandang standar tersebut bukan sebagai objek belanja, melainkan impact dari kegiatan. Sebagai contoh, pelatihan guru (yang dianggarkan di Standar Tenaga Pendidik) secara otomatis merupakan alat untuk mencapai Standar Isi. Ini menunjukkan bahwa struktur RKAS SDN 13 Siloro memiliki efisiensi program yang tinggi.

d. Sinkronisasi Antara Perencanaan dan Realisasi

Adanya kesesuaian antara angka-angka dalam dokumen RKAS dengan bukti observasi (pengadaan barang dan pelatihan) membuktikan bahwa penganggaran di SDN 13 Siloro bersifat riil, bukan sekadar pemenuhan administratif. Transparansi ini diperkuat dengan keterlibatan Komite Sekolah dalam memantau penyesuaian proporsi belanja modal dan belanja operasional.

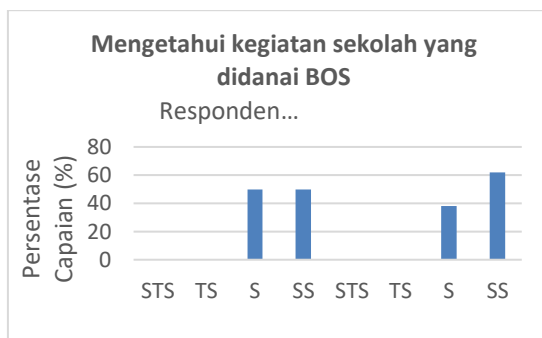
4. Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana

Berikut adalah uraian penelitian mengenai Evaluasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana di SDN 13 Siloro yang disusun dengan mengintegrasikan hasil wawancara, observasi, studi dokumen, serta analisis data kuesioner secara mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite, strategi transparansi dan akuntabilitas di SDN 13 Siloro bertumpu pada tiga pilar utama: keterlibatan pemangku kepentingan, pelaporan rutin berbasis digital, dan publikasi fisik. Sekolah melibatkan komite, orang tua, dan pengawas mulai dari tahap perencanaan (RAPBS) hingga pengawasan. Akuntabilitas diperkuat dengan penggunaan aplikasi ARKAS dan situs Datakudijarimu (BPK) untuk pelaporan secara vertikal kepada Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan BPK. Secara fisik, transparansi dilakukan melalui pemasangan papan data ARKAS di area umum sekolah.

Temuan ini divalidasi melalui studi dokumen (RKAS, SPTJM, dan LPJ) serta observasi langsung terhadap papan informasi anggaran. Namun, data kuesioner menunjukkan

adanya dinamika persepsi di lapangan:



a. Pengetahuan Kegiatan

Responden Guru menjawab “Setuju” sebesar 66,7%, dan sisanya atau 33,3% menjawab “sangat setuju”. Sedangkan orang tua siswa memberikan respon “setuju” sebesar 57,1% dan “sangat setuju” 42,9%. Dapat ditarik Kesimpulan bahwa responden, baik itu guru maupun orang tua, menyatakan mengetahui kegiatan yang didanai BOS.

b. Keterbukaan Laporan



Responden Guru menjawab “tidak setuju” sebesar 16,7%, “Setuju” sebesar 50%, dan sisanya atau 33,3% menjawab “sangat setuju”. Sedangkan orang tua siswa memberikan respon “tidak setuju” sebesar 23,8%, “setuju” sebesar

61,9% dan “sangat setuju” 14,3%. Terdapat perbedaan pendapat (disparitas). Sebanyak 16,7% guru dan 23,8% orang tua/wali siswa menyatakan tidak setuju bahwa sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana secara terbuka. Meskipun mayoritas masih memberikan respon positif (setuju/sangat setuju), munculnya suara tidak setuju ini memberikan catatan penting pada aspek keterbukaan laporan.

Analisis terhadap efektivitas praktik akuntabilitas di sekolah ini mengungkap beberapa poin kritis, yaitu :

a. Efektivitas Transparansi Visual dengan Digital

Strategi sekolah menggunakan papan data ARKAS (fisik) sangat efektif dalam memberikan pemahaman umum kepada publik, sebagaimana terbukti dari 100% responden yang mengetahui kegiatan sekolah. Namun, keterangan Bendahara mengenai "belum adanya akses digital bagi masyarakat" menjadi faktor penghambat transparansi yang lebih mendalam. Ketidaksediaan akses digital ini kemungkinan besar menjadi penyebab munculnya persentase

"tidak setuju" (16,7% - 23,8%) dalam hal keterbukaan laporan, karena masyarakat tidak bisa membedah rincian anggaran secara mandiri.

b. Akuntabilitas Formal yang Kuat

Dari sisi birokrasi, akuntabilitas sekolah sangat tinggi. Adanya dokumen SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dan audit rutin oleh Inspektorat serta BPK menunjukkan bahwa secara legal-formal, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Validitas data antara wawancara (klaim) dan dokumen (bukti) menunjukkan konsistensi yang baik.

c. Kesenjangan Komunikasi Laporan

Munculnya suara "tidak setuju" dari sebagian guru dan orang tua dalam kuesioner menunjukkan bahwa proses penyampaian laporan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan responden secara mendetail. Meskipun keterlibatan komite sudah dilakukan, informasi detail dalam LPJ mungkin belum tersosialisasikan secara merata kepada seluruh orang tua siswa, sehingga sebagian merasa laporan belum disampaikan secara terbuka sepenuhnya.

d. Pentingnya Integrasi Partisipasi Masyarakat

Analisis data menunjukkan bahwa akuntabilitas SDN 13 Siloro masih bersifat administratif-sentris (fokus pada laporan ke atasan/dinas). Untuk mencapai transparansi yang ideal, sekolah perlu mengubah pendekatan dari sekadar "memberitahu" (papan informasi) menjadi "menyajikan secara aksesibel" (digital atau forum khusus bedah laporan) guna meminimalisir persepsi negatif dari sebagian kecil pemangku kepentingan.

5. Efektivitas Pembiayaan terhadap Mutu Pembelajaran

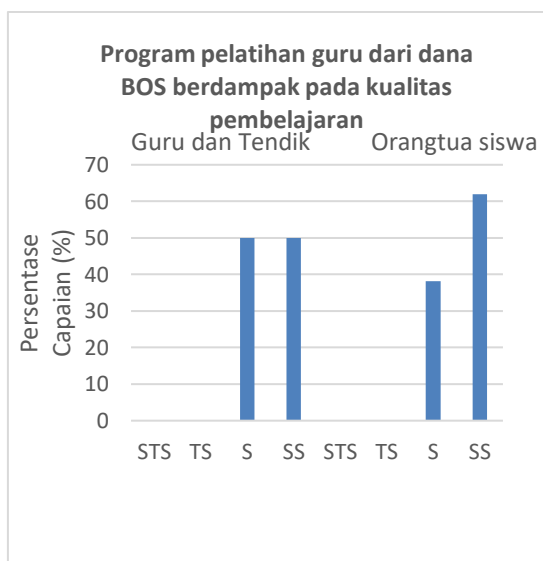
Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan di SDN 13 Siloro memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Meskipun Rapor Mutu BBPMP untuk tahun 2025 baru akan terbit pada Januari 2026, efektivitas pembiayaan tahun sebelumnya (2024) dan dampak tahun berjalan (2025) dapat diukur melalui Rapor Pendidikan Kemendikdasmen yang berbasis pada hasil ANBK.

Data Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan lonjakan capaian yang sangat tinggi dibandingkan tahun 2024:

- a. Kemampuan Literasi: Naik sebesar 41,82%.
- b. Kemampuan Numerasi: Naik sebesar 60,46%.
- c. Karakter Siswa: Naik sebesar 9,42%.

Atas prestasi peningkatan mutu ini, pemerintah memberikan apresiasi berupa alokasi Dana BOSP Kinerja pada tahun 2025. Hasil kuesioner menunjukkan dukungan kuat terhadap temuan ini:

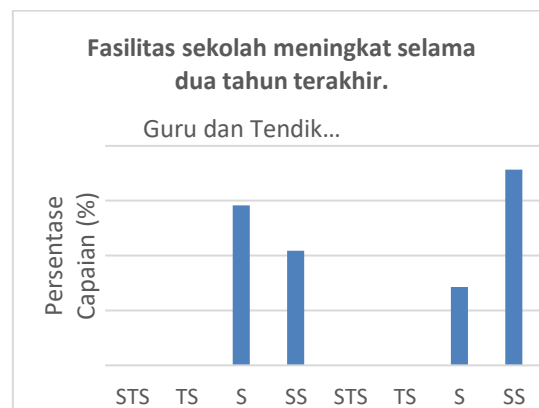
- a. Dampak Program pelatihan guru dari dana BOS pada kualitas pembelajaran



Pada kusioner tentang dampak Program pelatihan guru dari dana BOS pada kualitas pembelajaran, diperoleh nilai angket pada Responden Guru menjawab “Setuju” sebesar 50%, dan sisanya atau 50% menjawab “sangat setuju”.

Sedangkan orang tua siswa memberikan respon “setuju” sebesar 38,1% dan “sangat setuju” 61,9%.

- b. Peningkatan Fasilitas Sekolah



Pada kusioner tentang Peningkatan Fasilitas Sekolah dari dana BOS, diperoleh nilai angket pada Responden Guru menjawab “Setuju” sebesar 58,3%, dan sisanya atau 41,7% menjawab “sangat setuju”. Sedangkan orang tua siswa memberikan respon “setuju” sebesar 28,6% dan “sangat setuju” 71,4%.

Dari kedua hasil kusioner di atas, dapat ditarik Kesimpulan bahwa 100% responden guru dan orang tua setuju bahwa pelatihan guru yang didanai BOS berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Selain itu, mayoritas responden mengakui adanya peningkatan fasilitas sekolah dalam dua tahun terakhir, meskipun terdapat 16,7% responden guru yang menyatakan tidak setuju terkait

peningkatan fasilitas tersebut. Temuan ini divalidasi dengan studi dokumen Rapor Pendidikan dan laporan realisasi BOS, serta observasi fisik berupa pengadaan meja guru, buku paket siswa, pembuatan taman sekolah, dan pelaksanaan pelatihan guru.

Analisis terhadap data tersebut mengungkapkan beberapa dimensi efektivitas pembiayaan sebagai berikut:

a. Efektivitas Outcome-Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Hasil)

Keberhasilan sekolah dalam meraih Dana BOSP Kinerja merupakan indikator paling valid bahwa pembiayaan tahun sebelumnya telah dikelola secara efektif. Kenaikan drastis pada literasi (41,82%) dan numerasi (60,46%) menunjukkan bahwa alokasi anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi berhasil mengintervensi titik lemah siswa yang terpotret dalam ANBK.

b. Korelasi Investasi SDM dengan Kualitas Intruksional

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara investasi pada pelatihan guru dengan persepsi mutu pembelajaran. Hasil kuesioner (100%

setuju) membuktikan bahwa guru merasa kompetensinya meningkat dan orang tua merasakan dampak perubahan kualitas mengajar di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana untuk standar tenaga pendidik memiliki return on investment (hasil investasi) yang paling dirasakan langsung oleh pengguna layanan pendidikan.

c. Dinamika Persepsi Peningkatan Fasilitas

Meskipun secara fisik terdapat pengadaan meja, buku, dan taman, munculnya persepsi "tidak setuju" dari 16,7% guru mengenai peningkatan fasilitas menunjukkan adanya perbedaan ekspektasi atau prioritas kebutuhan. Analisis ini mengindikasikan bahwa meski secara makro fasilitas meningkat, mungkin masih ada kebutuhan sarana spesifik di kelas atau unit kerja guru yang belum terpenuhi secara merata.

d. Sinkronisasi Rapor Mutu dan Realisasi Fisik

Data menunjukkan adanya konvergensi data. Hasil positif pada Rapor Pendidikan Kemendikdasmen sinkron dengan bukti-bukti fisik di lapangan (buku paket dan sarpras). Hal ini menandakan bahwa validitas perencanaan yang disusun dalam

RKAS (berdasarkan Rapor Mutu sebelumnya) telah dijalankan secara tepat sasaran sehingga membuahkan hasil pada peningkatan mutu tahun ini.

PEMBAHASAN

Setelah memaparkan temuan data secara deskriptif pada bagian sebelumnya, bagian ini akan membahas lebih mendalam temuan tersebut dengan mengonfrontasikannya terhadap teori dan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan. Diskusi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesenjangan atau kesesuaian antara praktik tata kelola keuangan di UPT SD Negeri 13 Siloro dengan standar ideal yang berlaku, guna merumuskan langkah perbaikan strategis bagi sekolah.

1. Analisis Praktik Lapangan Berdasarkan Prinsip Manajemen Pembiayaan

Berdasarkan temuan penelitian, praktik pengelolaan dana BOS di UPT SD Negeri 13 Siloro dapat dianalisis melalui tiga pilar utama manajemen pembiayaan:

a. Efisiensi

Sekolah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik melalui integrasi perencanaan berbasis data (Rapor Pendidikan). Dengan mengalokasikan

44,6% dana pada Standar Sarana Prasarana, sekolah melakukan efisiensi jangka panjang dengan memperbaiki fasilitas yang mendukung proses belajar, sehingga mengurangi biaya perbaikan darurat di masa depan. Penggunaan aplikasi ARKAS juga menekan inefisiensi administratif melalui sistem pencatatan digital yang terintegrasi.

b. Efektivitas

Efektivitas pembiayaan di sekolah ini tergolong sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan korelasi langsung antara pengeluaran dana dengan capaian output pendidikan. Kenaikan drastis pada aspek Numerasi (60,46%) dan Literasi (41,82%) menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan untuk standar proses dan penilaian telah tepat sasaran (*hit the target*) dalam meningkatkan kompetensi dasar siswa. Perolehan BOS Kinerja menjadi validasi eksternal atas efektivitas penggunaan anggaran tersebut.

c. Akuntabilitas

Praktik akuntabilitas di UPT SD Negeri 13 Siloro bersifat berlapis, mencakup akuntabilitas vertikal (kepada Dinas Pendidikan dan BPK melalui situs Datakudijarimu) serta

akuntabilitas horizontal (kepada orang tua dan komite). Penggunaan papan informasi fisik merupakan bentuk nyata pertanggungjawaban publik. Namun, aspek ini masih memiliki ruang pengembangan karena belum tersedianya akses digital yang bisa dipantau secara mandiri oleh masyarakat umum di luar lingkungan sekolah.

2. Rekomendasi Perbaikan Sistem Pembiayaan Sekolah

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi di lapangan, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas sistem pembiayaan di UPT SD Negeri 13 Siloro:

a. Pengembangan Dashboard Transparansi Digital

Mengingat pelaporan sudah berbasis digital (ARKAS dan BPK), sekolah direkomendasikan untuk membuat update rutin ringkasan penggunaan dana melalui media sosial resmi sekolah atau situs web sederhana. Hal ini akan menjawab keterbatasan akses digital bagi wali murid yang tidak sempat datang ke sekolah untuk melihat papan informasi fisik.

b. Optimalisasi Standar Isi dan SKL dalam Narasi RKAS

Walaupun secara teknis biaya Standar Isi dan SKL melekat pada pos lain, sekolah sebaiknya mulai membuat catatan naratif dalam lampiran RKAS yang menjelaskan bagaimana pos-pos belanja tertentu berkontribusi langsung pada pencapaian materi kurikulum. Hal ini akan mempermudah pengawas dalam melihat benang merah antara belanja sarpras dengan pencapaian kompetensi lulusan.

c. Penguatan Kapasitas Paguyuban Orang Tua

Karena dana sumbangan masyarakat dikelola secara mandiri oleh paguyuban, sekolah perlu memberikan pendampingan teknis sederhana agar pelaporan dana swadaya tersebut memiliki standar transparansi yang sama baiknya dengan dana BOS, guna menghindari potensi konflik horizontal.

d. Penyusunan Rencana Strategis Pasca-BOS Kinerja.

Mendapatkan dana BOS Kinerja adalah prestasi, namun tantangannya adalah mempertahankan prestasi tersebut. Sekolah direkomendasikan menyusun rencana keberlanjutan (*sustainability plan*) agar peningkatan literasi dan numerasi tidak menurun saat dana

insentif tersebut sudah tidak diterima lagi di tahun-tahun mendatang.

E. Kesimpulan

Simpulan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UPT SD Negeri 13 Siloro memiliki struktur pendanaan yang sehat, terdiri dari BOS Reguler, BOS Kinerja sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan mutu, serta dana sumbangan masyarakat yang dikelola secara partisipatif melalui paguyuban orang tua untuk kebutuhan situasional.
2. Penyusunan RKAS telah dilakukan secara demokratis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Perencanaan anggaran didasarkan pada Rapor Mutu Pendidikan tahun sebelumnya, sehingga alokasi dana bersifat tepat sasaran dan berorientasi pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
3. Sekolah memberikan prioritas tinggi pada Standar Sarana dan Prasarana (44,6%) untuk mendukung lingkungan belajar, sementara Standar Isi dan Kompetensi Lulusan (SKL) diintegrasikan secara inklusif ke

dalam berbagai program kegiatan pembelajaran, bukan sebagai pos anggaran tunggal.

4. Sekolah telah menerapkan sistem akuntabilitas berlapis melalui pelaporan digital (ARKAS dan Datakudijarimu) serta publikasi fisik melalui papan informasi. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Komite Sekolah, Dinas Pendidikan, hingga Inspektorat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, O., Sonia, N. R., Darmawan, A., Anista, J. S. A., Abbas, D. S., Saputro, A. N. C., Poltak, H. Sundulusi, C., Darmawati., Harahap, E., Sijabat, D., Rahayu, H. A., Refika & Hasbi, I. (2021) *Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: CV. Widina Media Utama
- Fattah, Nanang. (2009). *Ekonomi dan Biaya Pendidikan*. Bandung: Rosda.
- Hidayat, Firmansyah., Tolla, Ismail. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. *Jurnal Administrasi, Kebijakan, dan Kepemimpinan Pendidikan (JAK2P)* Vol. (3) No (1) Juni 2022.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. 2022. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan*

Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Susanti, Putri., & Nafiah, Azizatun (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Sendangharjo Ngasem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.21009/JPD.XXX>.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional."

Waluyoh, Teguh., Harsono, Suyatmini (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, Vol. 4, Iss.1, 2023, <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>.

Nurjannah., Remmang., Hasanuddin., Suriani, Seri (2023) Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus: MTs. Syawir Dahlan Kab. Pangkajene dan Kepulauan).

Mangambo, Samirah Dunakhir, Fajriani Azis, (2024) Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Pangkep, PINISI, *Jurnal of Art, Humanity and Social Studies*. Vol. 4 No. 1, 2024..